**KOLABORASI PEMERINTAH DALAM MERAH PIALA PENGHARGAAN
ADIPURA DI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018**

Oleh: Amirudin

Email: [amir07121998.@gmail.com](mailto:amir07121998@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Wazni S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

ABSTRACT

The Adipura Program is contained in the Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 6 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of the Adipura Program in Chapter 1 General Provisions Article 1 that the Adipura Program is a national work of the Ministry of Environment to create an environmentally sound city towards sustainable development.

This study aims to determine the Collaboration of the Lingga Regency Government in winning the 2018 Adipura Award Cup, and also to find out the supporting factors for the Lingga Regency Government in winning the 2018 Adipura Award Cup. Meanwhile, the location of this research was conducted in Lingga Regency, precisely at the Environmental Service Lingga Regency. This research uses qualitative research methods.

The results of this study are collaboration in protecting the environment or Adipura activities between the Environmental Service and the community and the private sector have been optimally implemented, this is indicated by the presence of face-to-face dialogue, trust between stakeholders who are related to one another. And in terms of commitment of the parties involved, each of them has gone well. As for the supporting factors consist of two, namely internal factors and external factors. Internal factors, namely the support from agencies in Lingga Regency, and support from parties such as the Police, TNI, Satpol PP, and Damkar. Meanwhile, the external factor is the existence of good collaboration with the public and the private sector.

Keywords: Collaboration, Awards, Adipura.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik berupa individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan juga mamfaat. Kemampuan kolaborasi juga memungkinkan pihak tersebut untuk lebih mengenal dirinya sendiri, mulai dari kelebihan dan kekurangannya, saat sedang berkolaborasi dengan pihak lain secara tidak langsung akan mengetahui apa keterampilan yang bisa ditonjolkan dan bagian apa harus butuh bantuan pihak-pihak lain.

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup seperti tumbuhan hewan dan juga manusia, tetapi disini manusialah sebagai makhluk hidup yang diberi kelebihan lebih dari makhluk lainnya karena diberi akal untuk berfikir, maka dari itu besar tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga. Lingkungan yang bersih merupakan awal hidup sehat, diIndonesia sendiri untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih pemerintah Indonesia membuat berbagai macam kegiatan serta melakukan berbagai macam upaya dan program kebersihan yang tujuannya adalah menciptakan Indonesia yang bersih dan hijau. Masalah lingkungan merupakan persoalan bersama tidak hanya pemerintah saja yang harus terlibat didalamnya tetapi masyarakat juga berperan penting dalam menjaga dan memelihara lingkungan.

Program Adipura sendiri merupakan suatu penghargaan bagi kota yang ada di Indonesia, berupa bentuk kebersihan serta pengelolaan lingkungan yang baik. Adipura sendiri diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan setiap tahun sejak 1986, kemudian program ini terhenti

pada tahun 1998 dan kembali dicanangkan pada tanggal 5 Juni 2002 dan berlanjut hingga sekarang.

Program ini bertujuan untuk mendorong kota-kota yang ada di Indonesia supaya menjadi kota bersih dan teduh. Adapun pengertian kota dalam penilaian adipura bukanlah kota atonom, melainkan bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu.

Piala Adipura sendiri merupakan penghargaan terhadap kota tebersih dan asri, dengan beberapa kriteria tertentu. Sebuah tim yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penilaian terhadap kebersihan kota dan keasriannya. Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten atau kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha dengan pemberian penghargaan Adipura untuk mewujudkan wilayah yang berkelanjutan, secara ekologis, sosial dan ekonomi.

Untuk memperoleh piala adipura tersebut sejalan dengan usaha Kabupaten Lingga dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Terdapat pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2018 menyebutkan.¹

1. Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah

¹ Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Lingga Tahun 2018

- tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan sistem instansi dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. Penguatan penegakan hukum;
 - i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan pemerintah daerah;
 - j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program Adipura disusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang pedoman pelaksanaan program Adipura. Dalam permen LHK ini, program Adipura dilaksanakan pada kabupaten/kota yang

dikelompokkan berdasarkan kategori fungsional kota²:

- a. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
- b. Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
- c. Kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa; dan
- d. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.

Sementara itu kriteria penilaian Adipura menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.
2. Pemamfaatan ekonomi dari pengelolaan sampah dan RTH.
3. Pengendalian pencemaran air.
4. Pengendalian pencemaran udara.
5. Pengendalian dampak perubahan iklim.
6. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan.
7. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
8. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Program Adipura harus mampu mendorong terwujudnya kota-kota diIndonesia yang tidak hanya bersih, hijau, dan sehat, namun juga berkelanjutan dalam mewujudkan kota-kota yang layak huni (*litable city*). Kota-kota yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga pembangunan lingkungan

dengan turut mendorong partisipasi aktif masyarakat.³

Adapun yang mengatur program adipura terdapat pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program Adipura terdapat pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 bahwa program adipura merupakan kerja Kementerian Lingkungan Hidup yang berlingkup nasional untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuan program Adipura adalah terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah yang bersih dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan serta sebagai dorongan terhadap pemerintah kabupaten /kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibidang lingkungan hidup, yang salah satunya dalam bentuk anugerah Adipura yang diberikan terhadap kabupaten/kota yang dinyatakan berhasil dalam pengelolaan lingkungan.

Table 1.1
Kegiatan Yang Dilakukan Kabupaten Lingga Dan Anggaran Yang Dikeluarkan Untuk Mensukseskan Kegiatan Dalam Meraih Piala Adipura Tahun 2018.

No	Kegiatan	Jumlah	Biaya
1.	Pembagusan Taman	7	Rp. 61.325.000,00
2.	Pembagusan Pantai	13	Rp. 180.219.500,00
3.	Tempat Sampah	168	Rp.57.499.000,00
4.	Tempat Pembuangan Sampah Akhir	21	Rp.93.573.900,00
5.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	4	Rp.17.350.400,00
Jumlah		213	Rp. 409.967.800,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga 2020

Beberapa keberhasilan dari Pemerintah Kabupaten Lingga dalam meraih piala Adipura tahun 2018:

²Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/kum.1/6/2016

³ Fahrul Rozi, Skripsi, Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017, (Fisip, Universitas Riau). Hal. 3

1. Sebuah apresiasi yang luar biasa untuk pertama kalinya Kabupaten Lingga dengan luas lautannya lebih luas dibandingkan daratan mampu meraih piala adipura. Dimana hal ini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga Junaidi Adjam mengatakan keberhasilan Kabupaten Lingga mendapat adipura bukan hanya kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten saja, tapi tentunya didukung oleh masyarakat dan swasta⁴.
2. Kabupaten Lingga dengan wilayah yang lebih luas lautan dibanding daratan mampu menyaingi kota-kota yang ada di Kepulauan Riau diantaranya kota Tanjung Pinang, Batam, Karimun, Natuna, Anambas dan Bintan. Dimana dilihat dari kondisi peta yang ada di Kepulauan Riau Kabupaten Lingga memiliki luas daratan yang lebih luas dari Kabupaten lainnya. Tapi pada tahun 2018 Kabupaten Lingga mampu meraih penghargaan Adipura⁵.

Dengan ini maka saya tertarik untuk meneliti mengenai “**Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Meraih Piala Penghargaan Adipura tahun 2018**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan dan fenomena yang ada, maka penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Meraih Piala Penghargaan Adipura Tahun 2018?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung Pemerintah Kabupaten Lingga dalam meraih Piala Penghargaan Adipura Tahun 2018?

⁴ Pemkab Lingga Raih Penghargaan Adipura Kabupaten Lingga. <http://www.linggakab.go.id/2017/07/31/pemkab-lingga-raih-penghargaan-adipura/> diakses 06 Desember 2019.

⁵*Ibid*

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lingga dalam meraih Piala Penghargaan Adipura Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung Pemerintah Kabupaten Lingga dalam meraih Piala Penghargaan Adipura Tahun 2018.

Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pemerintahan, terutama di bidang Kolaborasi Pemerintah.
2. Secara Praktis, Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terlebih lagi bagi pemerintah dan lembaga-lembaga yg membutuhkan terutama dibidang menjaga lingkungan yang baik, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian-penelitian pada bidang yang menyangkut tentang kolaborasi Pemerintahan dan masyarakat terutama dalam meraih penghargaan Adipura.

Kerangka Teori

Kolaborasi

Kolaboratif menuntut adanya penyamaan visi dan penyamaan tujuan yang ingin dicapai, adapun yang dilakukan berupa strategi dan aktifitas untuk mencapai suatu tujuan. Walaupun kolaborasi sendiri memiliki penyamaan visi, tujuan, strategi, dan aktifitas antar pihak, mereka masing-masing tetap

memiliki otoritas yang mengambil keputusan secara independen.⁶ Menurut Wanna, kolaborasi bekerja sama atau bekerja sama dengan pihak lain. Ini berarti para aktor individu, kelompok atau organisasi bekerja sama di beberapa usaha.⁷

Menurut Riley mendefinisikan kolaborasi merupakan relasi dalam bentuk spesifik yang menempatkan relasi dalam bentuk spesifik yang menempatkan relasi organisasi non pemerintah (yang concern dalam isu-isu lingkungan dan sumber daya alam) dengan organisasi pemerintah.⁸

Sedangkan menurut Ansel dan Gash pengertian Kolaborasi merupakan sebuah pengetahuan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.⁹

Ansel dan Gash menekankan pada 6 (enam) kriteria yang penting untuk mendefinisikan Kolaborasi.¹⁰

1. Forum diinisiasi oleh badan publik.
2. Peserta forum termasuk aktor non pemerintah.
3. Peserta terlibat dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan bukan hanya berperan konsultasi saja.
4. Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama.
5. Forum bertujuan membuat keputusan atas kesepakatan bersama.
6. Fokus dari kolaborasi adalah kebijakan publik maupun manajemen publik.

⁶ Agus Dwiyanto, *Manajemen Publik: Peduli, Inklusif dan Kaloratif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm 251

⁷ Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kalaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 25

⁸ *Ibid*, hlm 26

⁹ Purwanti Nurul D, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kaloratif, Isu-Isu Kontemporer*. (Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM: 2016), hlm 175

¹⁰ *Ibid*, hlm 175-176

Kolaborasi menitik beratkan kepada *sharing risk* dan pertanggung jawaban kedepan untuk menghindari penyalahgunaan dari yang berwenang. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan atau *good* dapat dicapai. Tahapan membentuk kolaborasi sebagai berikut:¹¹

1. Dialog tatap muka (*face to face*)

Dialog tatap muka adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Didalam dialog antar muka sering terjadi perbedaan pandangan antar stakeholder, masing-masing ingin memperkuat stereotip dan saling meningkatkan antagonismenya, namun dialog tersebut memang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama.

2. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai koloratif. Oleh karena itu, jika sejarahnya menunjukkan adanya antagonisme antar *stakeholder*, maka pembuat kebijakan harus mencari waktu untuk membangun kepercayaan kembali.

3. Komitmen dalam proses (*Comitment to proses*)

Komitmen dari *stakeholder* dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi. Meskipun demikian dalam melaksakan komitmen ini terkadang penuh dilema. Misalnya *stakeholder* harus mengetahui hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut mengharuskan dengan *stakeholder* yang berbeda pandangan. Oleh sebab itu maka komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggung jawab masing-masing *stakeholder* dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen

¹¹ Abdul Sabaruddin, Op. Cit, hal 31

pada proses merupakan konsekuensi atas keterlibatan dari masing-masing anggota dalam forum.

4. Saling berbagi pengertian dan pengalaman (*Share Understanding*)

Pada beberapa titik dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus saling berbagi pemahaman dan pengalaman bersama. Pemahaman dan pengalaman bersama yang menyangkut visi bersama, misi bersama, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyelarasan nilai-nilai inti, dan penyelarasan pada definisi masalah.

5. Hasil sementara (*Outcome*)

Disini literature menunjukkan bahwa kolaborasi akan terjadi ketika tujuan dan keuntungan dari kolaborasi siafatnya kongkrit. Sedangkan keuntungan dari kolaborasi akan mendatangkan sinergitas antar *stakeholder*.

Menurut Government of Canada, terhambatnya jalan suatu kolaborasi disebabkan oleh banyak faktor, terutama faktor budaya, faktor institusi-institusi, dan faktor politik.¹² Adapun tujuan kolaborasi adalah yang pertama ialah memecahkan masalah, yang kedua menciptakan sesuatu, dan ketiga menemukan sesuatu didalam sebuah hambatan.¹³

Adapun faktor yang mempengaruhi jalannya hubungan kerjasama kolaborasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:¹⁴

1. Faktor sumber daya

Faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* adalah sumber daya manusia dan sumber

daya keuangan. Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan merupakan faktor yang penting dalam setiap kegiatan kolaborasi. Sumber daya manusia yang berperan dalam kolaborasi ini sudah memiliki kopetensi di bidang masing-masing sehingga mereka tahu apa yang seharusnya dikerjakan dan sesuai dengan peran masing-masing sedangkan untuk sumber daya keuangan sudah disediakan dari anggaran APBD dan APBN.

2. Faktor Otoritas

Otoritas atau kewenangan merupakan faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Dengan adanya otoritas dan kewenangan yang diberikan oleh *stakeholders* maka *stakeholders* yang lain bisa menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing baik itu melalui sebuah prosedur atau pemberian kebebasan untuk berinovasi.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1987), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada¹⁵.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

¹² Ratna Dewi, Op, Cit, hlm 86

¹³ T. Anisa Putri, Kalaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru 2015), Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, 2017, hlm 10

¹⁴ Ratna Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponogoro)*, Tesis Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret, 2012, hlm. 116

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Hlm.5.

kejadian¹⁶. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencairan fakta dengan menggunakan implementasi yang tepat¹⁷.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Lingga

1.1 Sejarah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga sendiri memiliki pusat pemerintahannya di Daik Lingga, Kabupaten ini juga memiliki 13 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 82 desa. Adapun yang menjabat sebagai bupati dan wakil bupati pada tahun 2018 yaitu bapak Alias Wello dan bapak M. Nizar.

Sejak dulu Kabupaten Lingga telah dikenal beberapa abad yang silam sebagai Kerajaan Melayu Riau Lingga dan mendapat julukan “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Pada kurun waktu tahun 1722 - 1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang mana pusat kerajaannya berada di Daik Lingga dan untuk Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.

Sebelum ditandatanganinya *Treaty of London*, maka kedua Kerajaan Melayu tersebut disatukan sehingga kerajaan tersebut menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya terletak di wilayah Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di seluruh wilayah nusantara dan juga kawasan Semenanjung Malaka.

Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir - amirnya sebagai *District Board* untuk daerah yang besar dan *Onder District Board*

untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua afdelling yaitu :

1. Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau – Lingga, Indragiri Hilir, dan Kateman yang kedudukannya berada di wilayah Tanjungpinang dan sebagai penguasanya ditunjuk seorang Residen.
2. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat diperintah oleh asisten residen (dibawah) perintah residen. Pada tahun 1940, Keresidenan ini dijadikan menjadi *Residence Riau* dengan dicantumkannya Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur), dimana berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 17 Juli 1947 No.9, maka dibentuklah daerah *Zelf Bestur* (daerah Riau).

Berdasarkan Surat Keputusan dari delegasi Republik Indonesia (RI), maka Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat daerah kewedanan sebagai berikut :

1. Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat, dan Tanjungpinang Timur sekarang).
2. Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur, dan Moro.
3. Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Kecamatan Singkep, dan Kecamatan Senayang.
4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

¹⁶Sumdai Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm.76.

¹⁷Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), Hlm 55.

Kemudian berdasarkan atas dari Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Pebruari 1964 No. 524/A/1964 dan Instruksi No. 16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau per - tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No. UP/256/5/1965 menetapkan terhitung mulai Tanggal 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.

Berdasarkan Undang-Undang No.53 Tahun 1999 dan UU No.13 Tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Wilayah Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi 9 kecamatan saja yang mana terdiri dari: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Tambelan, Kecamatan Tanjungpinang Barat, dan Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2001, maka Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang mana statusnya bersamaan dengan kabupaten yang membawahi Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. Dengan demikian, maka Kabupaten Kepulauan Riau hanya meliputi Kecamatan Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur dan Tambelan.

Selanjutnya pada akhir tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003 tanggal 18 Desember 2003, yang mana memiliki wilayah Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, Senayang. Dan sekarang pada tahun 2017 Kabupaten Lingga di mekarkan menjadi 10 kecamatan dengan menambahkan Selayar, Lingga

Timur, Singkep Pesisir, Singkep Selatan dan Posek sebagai Kecamatan baru.

2. Letak dan Geografis Kabupaten Lingga

Secara astronomis, Kabupaten Lingga terletak di antara 0 20'Lintang Utara dan 0 40' Lintang Selatan dan antara 104 -105 Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Lingga memiliki batas-batas :

- Utara : Kota Batam dan Laut Cina Selatan
- Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala
- Barat : Laut Indragiri Hilir
- Timur : Laut Cina Selatan

Sementara itu iklim di Kabupaten Lingga mempunyai sifat-sifat yaitu suhu rata-rata 26,8'c; kelembaban relatif rata-rata 84%; kecepatan angin rata-rata 5 Knot; tekanan udara rata-rata 1009,4 milibar; jumlah curah hujan rata-rata 13,5 mm/hari; penyinaran matahari rata-rata 52%. Kabupaten Lingga sendiri dialiri oleh sungai-sungai yang menjadi potensi sumber air bagi pemenuhan kebutuhan air baik bagi pertanian ataupun kegiatan yang lainnya.

Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92% wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 15% sedangkan yang berupa daratan (kemiringan yang kurang dari 2%) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 % saja.

Adapun jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol, sementara itu lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal, sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Untuk jenis batun-batunya, batuan pluton asam (*Acid Pluton*) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan gunung daik dibagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari zaman prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga.

Kabupaten Lingga terdiri dari 13 Kecamatan, yaitu Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Selayar, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Temiang Pesisir, Kecamatan Bakong Serumpun dan Kecamatan Senayang. Kabupaten Lingga terdiri dari 2 pulau besar yaitu pulau Singkep dan pulau Lingga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Lingga Dalam Meraih Piala Penghargaan Adipura Tahun 2018.

1. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialog*)

Dialog tatap muka sendiri merupakan sebuah cara untuk mencegah kecurigaan antar aktor dalam membangun sebuah kolaborasi dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama ditahap awal sebuah kolaborasi. Dialog tatap muka merupakan proses membangun trust, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses.¹⁸

Para Pemerintah di Kabupaten Lingga (DLH) berperan penting untuk membangun pendekatan terhadap masyarakat agar bisa bekerjasama dengan pemerintah. Maka dari itu Dinas Lingkungan hidup selalu melakukan kegiatan seperti mengadakan sosialisasi terhadap lingkungan, dan disana juga di berikan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya supaya bisa membangun lingkungan lebih baik. Disini pertemuan tatap muka dilakukan seperti dilakukan kegiatan gotong royong disanalah masyarakat pemerintah maupun pihak swasta saling bertukar pikiran dan

bekerjasama untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai bersama.

2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*).

Membangun kepercayaan atau disebut juga dengan *Trust building* sangat penting untuk membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi.¹⁹ Dari segi masyarakat dan pihak swasta Kabupaten Lingga, peran pemerintah sangatlah penting memberikan kepercayaan kepada mereka karna dalam proses membangun lingkungan menjadi lebih baik. Untuk itu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta harus bekersama, selanjutnya mengenai kepercayaan masyarakat dan pihak swasta terhadap pemerintah di Kabupaten Lingga (DLH) pada tahun 2018 sudah mempunyai kepercayaan satu sama lain.

Bagi pemerintah memberikan bukti yang baik dalam menjaga dan melestarikan lingkungan buktinyatanya terdapat pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Mampu mensukseskan kegiatan menjaga lingkungan dengan baik sehingga mendapatkan penghargaan Adipura. Maka dari itu pihak masyarakat dan swasta mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada Dinas Lingkungan Hidup. Untuk itu masyarakat membantu mensukseskan dalam menjaga Lingkungan.

Tingginya tingkat saling percaya dan juga saling menghormati satu sama lain maka dari itu akan mempermudah kerjasama atau disebut dengan Kolaborasi dalam mendelegasikan tugas dan masing-masing pihak yang terlibat dalam pengakuan menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura. Selanjutnya kepercayaan memiliki tata cara kerja yang luar biasa, karna dengan memberikan kepercayaan kepada seseorang mengajarkan untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan.

Trust building ini juga dimulai dari pihak masyarakat dan swasta yang memberikan kepercayaan penuh terhadap

¹⁸ Bagus Nuari Harmawan, *Collaborative Government* Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. Jurnal E-SOSPOL; Vol. IV Edisi 1;Jan-April 2017, hal.53.

¹⁹ Abdullah Sabaruddin, *Op. Cit*, hlm. 29

pemerintah (DLH) untuk mengatur kegiatan bersama agar bisa membangun lingkungan yang baik, dikarenakan setiap kegiatan yang dilakukan orang banyak harus mempunyai tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dan berkomitmen untuk saling bahu membahu agar dapat tujuan yang ingin di capai. Masyarakat dan pihak swasta yang ada dikabupaten lingga mempunyai sifat kepercayaan yang tinggi, ini dikarenakan dari zaman nenek moyangnya yang menganut mudah mempercayai. Akan tetapi apabila kepercayaan tersebut tidak di pergunakan dengan baik maka jangan pernah untuk mendapat kepercayaannya. Maka untuk itu pihak pemerintah yang sudah dapat kepercayaan masyarakat dan pihak swasta tidak akan melupakan hal tersebut. Untuk itu pihak pemerintah mengandalkan kepercayaan masyarakat dan pihak swasta untuk melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dengan baik.

3. Komitmen dalam Proses (Comitment to Proses)

Komitmen dalam proses atau disebut *Comitment to Proses* merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen berarti mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi bahwa dalam proses ini merupakan hak milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan mamfaat bersama pula.²⁰

Didalam komitmen ini terlihat pada upaya untuk bersedia menerima hasil suatu musyawarah, di Kabupaten Lingga pemerintah, masyarakat dan pihak swasta memiliki komitmen yang bisa dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertemuan ataupun tatap muka yang sering diadakan terkait dalam menjaga lingkungan atau kegiatan Adipura. Selain itu juga didukung oleh pihak seperti Polri, TNI, Satpol PP, dan Damkar, dalam hal ini menerima

keputusxcan dari pemerintah Kabupaten Lingga pada saat melakukan musyawarah atau juga tatap muka terkait pengakuan masyarakat dan pihak swasta.

4. Saling Berbagi Pengertian dan Pengalaman (Share Understanding)

Dalam *Collaborative Government*, para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Inilah yang dimaksud dengan *share understanding* oleh Ansel dan Gash. *Share Understanding* merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relavan dalam mengatasi masalah. Dalam proses *collaborative government*, harus memiliki rasa saling berbagi pengertian dan pengalaman atau bisa dibilang saling bebagi pemahaman bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.

Selanjutnya yaitu saling berbagi pemahaman dalam proses kegiatan menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura berjalan cukup baik, ini dilihat dari respon atau seperti tanggapan positif dari setiap pertemuan atau musyawarah yang dilaksanakan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang terlibat dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura. Seperti halnya dalam peroses berjalannya kegiatan tersebut tidak ada hambatan ataupun tanggapan negatif, akan tetapi butuh waktu yang cukup lama dalam berbagi pemahaman ini agar pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terkait bisa menyamakan tujuan bersama. Karna dari segi pengertian dan pengalaman bersama yang menyangkut visi misi, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, juga penyelarasan nilai-nilai inti dan penyalاران pada definisi yang akan dihadapi selanjutnya.

5. Hasil Sementara (Intermediate Outcome)

Hasil sementara atau biasa disebut dengan *Intermediate Outcome* adalah hasil-hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang juga memberikan

²⁰ Ibid.,hal. 42

mamfaat dan bernilai strategis. Adapun hasil sementara yang dapat dimanfaatkan dari collaborative government antara pihak pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam penetapan dalam menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Lingga adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan masyarakat Kabupaten Lingga untuk menjalankan kewajiban secara bersama-sama dalam mengelola lingkungan agar selalu terjaga kelestaraan dan keasriannya berdasarkan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Kemudian juga bisa meningkatkan potensi kesadaran akan pentingnya dalam menjaga lingkungan yang ada di Kabupaten Lingga, tidak hanya itu kesepatan dalam menjaga hutan agar selalu terjaga sehingga tidak ada lagi yang menebang hutan secara membabi buta, agar bisa terwujudnya ruang terbuka hijau yang luas di Kabupaten Lingga.
- b. Terbitnya regulasi dari Pemerintah Kabupaten yakni Surat Keputusan (SK) Bupati tentang menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura di Kabupaten Lingga pada tanggal 26 Februari 2018. Hal ini juga dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: 86/KPTS/II/2018. Tentang Pengakuan Tim Susunan dan Penanggung Jawab Terhadap Lokasi Titik Pantau Program Adipura Kabupaten Lingga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa banyak sekali mamfaat yang ditimbulkan dari pengakuan dalam menjaga lingkungan hidup agar selalu terjaga juga banyak menimbulkan sisi positif untuk pihak pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, dan juga keluarnya Surat Keputusan Bupati Lingga yang mensupport kegiatan dalam penjagaan lingkungan hidup atau kegiatan Adipura agar selalu tetap terjaga dan juga terdapat

didalamnya tim-tim yang harus terlibat dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Lingga.

B. Faktor-Faktor Pendukung Pemerintahan Kabupaten Lingga Dalam Meraih Piala Penghargaan Adipura Tahun 2018.

Pentingnya dalam menjaga lingkungan hidup merupakan hal yang sangat diinginkan dan didambakan baik itu dari pihak pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta terutama di daerah Kabupaten Lingga. Dimana didalam segi hukumpun menjaga lingkungan sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya dan sudah jelas bahwa begitu pentingnya lingkungan yang bersih, hal ini juga disandingkannya keluarnya Surat Keputusan dalam penetapan tim yang mempunyai tugas dalam penjagaan lingkungan agar tetap terjaga. Adapun faktor-faktor pendukung pemerintahan Kabupaten Lingga dalam mensukseskan kegiatan menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura dan juga mensupport kegiatan ini sehingga Kabupaten Lingga bisa mendapatkan penghargaan piala Adipura pada tahun 2018:

1. Faktor Internal

1.1. Adanya Dukungan Dari Dinas-Dinas di Kabupaten Lingga.

Dinas merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Kabupaten Lingga mempunyai sebanyak 16 dinas akan tetapi yang menjadi peranan penting dalam kegiatan peraih penghargaan piala Adipura tahun 2018 ini pemerintah pusat mempercayai dinas lingkungan hidup sebagai ketua tim yang dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Lingga.

Dukungan dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Lingga yang cukup besar dalam pengakuan terhadap menjaga lingkungan hidup di Kabupaten Lingga, didalam dukungan ini dinas-dinas yang ada di Kabupaten Lingga tidak hanya melakukan dukungan seperti akan setuju dengan kegiatan tersebut akan tetapi, juga melakukan pelandangan dana untuk menjaga lingkungan, disebabkan dana khusus dari Pemerintah pusat dalam kegiatan Adipura atau dalam menjaga lingkungan tidak ada untuk menangani kegiatan adipura.

Table 2
Penetapan Tim Dalam Kegiatan Meraih Adipura di Kabupaten Lingga dan Dinas-Dinas Yang Terlibat

No	Nama Dinas	Jabatan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Tim
2.	Dinas Perhubungan	Anggota
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
4.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Anggota
5.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.	Anggota
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Anggota
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan.	Anggota
8.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.	Anggota
9.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.	Anggota
10.	Dinas Pendidikan	Anggota
11.	Dinas Kebudayaan	Anggota
12.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
13.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
16.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga 2018

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan bahwa penapan dalam menjaga lingkungan hidup dan mensukseskan kegiatan Adipura dinas-

dinas yang ada di Kabupaten Lingga semuanya ikut serta dalam kegiatan Adipura, adapun yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan Adipura ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, yang membantu Pemerintah pusat Kabupaten Lingga dalam kegiatan penetapan dalam menjaga lingkungan dan mensukseskan kegiatan Adipura.

1.2.Dukungan Dari Pihak Polres TNI Satpol PP dan Damkar.

Pihak Polres, TNI, Satpol PP dan Damkar merupakan aparat yang membantu pemerintah pusat menjalankan pemerintahanya, dalam segi keamanan dan keselamatan masyarat. Mendapatkan dukungan dari pihak ini dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, pastinya pihak pemerintah sudah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak ini, adapun dalam pertemuan dengan pihak-pihak ini yang memimpin pertemuannya langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil pertemuan pihak seperti Polres, TNI, Satpol PP dan Damkar dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan beserta jajaranya, dalam pertemuan ini pihak tersebut memberi dukungan penuh terhadap dalam kegiatan dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, selanjutnya mereka juga siap membantu Dinas Lingkungan Hidup sepenuhnya dalam menjaga lingkungan hidup.

Didalam pertemuan ini juga mengeluarkan seperti titik pantau atau tanggung jawab dalam menjaga lingkungan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga pihak Polres, TNI, Satpol PP dan Damkar menyetujui hal tersebut. Adapun titik pantau yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup untuk pihak Polres, TNI, Satpol PP dan Damkar dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura sebagai berikut:

Table 3

**Penetapan Tim Pemantau Penetapan
Dalam Menjaga Lingkungan Hidup
Atau Kegiatan Adipura Untuk Polres,
TNI, Satpol PP dan Damkar**

No	Nama	Titik Pantau
1.	Polres	<ul style="list-style-type: none"> • Polres Lingga • Polsek Dabo Singkep • Jl. Kartini Daik Lingga
2.	TNI	<ul style="list-style-type: none"> • Lanal Dabo Singkep • Pasar Ikan Dabo Singkep
3.	Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> • Taman Kota Pagoda Dabo Singkep • Taman Kota Simpang Empat Dabo Singkep • Pertokoan Dabo Kota • Pertokoan Daik Lingga • Pasar Sayur Dabo Singkep
4.	Damkar	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Hang Jebat Daik Lingga • Bandara Udara Dabo Singkep • TELKOM • PDAM

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga 2018

Berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa Pihak Polres, TNI, Satpol PP dan Damkar memiliki titik pantau masing-masing yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, selanjutnya titik pantau tersebut menjadi tanggung jawab penuh kepada pihak yang sudah di tetapkan, dan dalam kegiaitan menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, patinya pihak Dinas Lingkungan Hidup juga mengharapkan kerjasama yang baik dari pihak Polres, TNI, Satpol PP dan Damkar.

2. Faktor Eksternal

2.1. Adanya Kolaborasi yang Baik dengan Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata latin *Socius* yang berarti (kawan). Dalam istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab *Syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Selanjutnya didalam percakapan sehari-hari, sistem

pengendalian sosial (*social control*) sering kali diartikan sebagai pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, terkhusus pihak pemerintah beserta aparaturnya.²¹

Selanjutnya mengenai kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pihak pemerintah merupakan faktor pendukung dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, karena dengan adanya kegiatan seperti kerjasama dan komunikasi yang baik bisa menambah pemahaman dalam hal menjaga lingkungan hidup dan mengetahui kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah dalam bentuk kegiatan Adipura, masyarakat juga mempunyai penambahan wawasan mengenai Kegiatan apa Adipura tersebut.

2.2. Adanya Kolaborasi yang Baik dengan Pihak Swasta

Pihak swasta merupakan suatu badan usaha yang pengelola dan pemilik modalnya berasal dari kalangan swasta secara penuh, ini berarti tanpa ada campur tangan pihak pemerintah. Akan tetapi pihak swasta sangatlah berpengaruh dalam setiap kegiatan yang akan diadakan oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini untuk penetapan dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura pemerintah Kabupaten Lingga melakukan bebarapa kegiatan untuk mengajak pihak swasta dalam membantu mensukseskan acara dalam penetapan menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura.

Kolaborasi yang baik antara pihak swasta dengan pihak pemerintah merupakan faktor pendukung dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, sementara itu kerjasama pihak swasta dengan pihak pemerintah terjadi pada tahun 2017, dimana pihak pemerintah mengadakan pertemuan dengan pihak swasta untuk melakukan kerjasama dalam menjaga lingkungan, kemudian pihak

²¹ Soejono soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm 177.

swasta sendiri dalam pertemuan tersebut sangat setuju dengan akan diadakan kegiatan seperti itu bahkan pihak swasta mengatakan agar kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan.

3. Kegiatan Yang di Lakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menjaga Lingkungan Untuk Meraih Piala Adipura.

Untuk mensukseskan kegiatan yang akan di hadapi pastinya ada tata cara kinerja atau untuk bertindak agar suatu kegiatan tersebut bisa tercapai dengan baik, maka dari itu pemerintah Kabupaten Lingga melakukan beberapa strategi untuk melakukan hal tersebut menjadi lebih mudah, maka dari itu pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, kegiatan tersebut seperti gotong royang. Kata Bapak M. NUR EFFENDY. SE. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan. Kegiatan dilakukan gotong royong itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak swasta agar mereka tahu bagaimana pentingnya untuk menjaga lingkungan.

Sementara itu terdapat tempat-tempat yang ada di dua Kecamatan tersebut yang menjadi perhatian khusus untuk dijaga bersihannya dan sudah mempunyai tugas masing-masing pihak untuk menjaganya..

Table 4
Lokasi Jalan Yang Dalam Pemantauan Khusus Menjaga Kebersihan Dan Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

Nama Lokasi	Penanggung Jawab	Komponen Yang Dipantau
Jl. Garuda	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Dinas Capil Disperindag Samsat Camat Singkep RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL
Jl. Pahlawan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Bea dan Cukai Kantor Pos dan Giro 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL

	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Pajak Camat Singkep Lurah Dabo RT/RW Setempat 	
Jl. Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Pos Lintas Bank Riau Kepri Bank BRI Camat Singkep Lurah Dabo RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL
Jl. R. Ali Haji	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Puskesmas Lurah Dabo Lama Kades Batu Berdaun 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL
Jl. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum RSUD Dabo PDAM Camat Singkep RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL
Jl. Pagoda	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum PLN SDN 014 Dabo RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL
Jl. Kartini	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Lanal Dabo Singkep Pengadilan Agama SMPN 2 Dabo SMAN 2 Dabo Kantor Imigrasi Perpustakaan Daerah Satiantas Polres Lingga Camat Singkep Lurah Dabo RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL
Jl. Hang Kasturi	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Lurah Sungai Lumpur Karang Taruna Sungai Lumpur 	<ul style="list-style-type: none"> Area Jalan RTH Drainase PKL

	<ul style="list-style-type: none"> • RT/RW Setempat 	
Jl. Sergang Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Bandara Dabo • Kades Tanjung Harapan • RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Area Jalan • RTH • Drainase • PKL
Jl. Hang Jebat	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Pemuda Pancasila (PP) • RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Area Jalan • RTH • Drainase • PKL
Jl. Dewa Ruci	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • UPTD Dinas Pendidikan • Pemuda Panca Marga • Vihara Kumala Matreya • RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Area Jalan • RTH • Drainase • PKL
Jl. Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Kejaksaan Negeri Daik Lingga • Pos Perhubungan Darat 	<ul style="list-style-type: none"> • Area Jalan • RTH • Drainase • PKL
Jl. Pramuka	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Danramil 0315/04 • PSMTI • RT/RW Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> • Area Jalan • RTH • Drainase • PKL

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga 2018

PENUTUP

Kesimpulan

Kolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, pihak pemerintah pusat mempercayai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menangani dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura. Adapun dalam proses kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Pemerintah melakukan kegiatan yang pertama memberikan sosialisasi atau memberi himbauan mengenai pentingnya dalam menjaga lingkungan, sementara itu proses kolaborasi itu muncul disebabkan adanya kegiatan yang dibuktikan oleh

pihak pemerintah dalam kegiatan menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura pada tahun 2017 bahwa Kabupaten Lingga mampu mendapatkan berupa penghargaan Adipura.

Proses kolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura antara Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan pihak swasta sudah optimal dilaksanakan, ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga lingkungan, didukung oleh masyarakat dan pihak swasta, dan pihak-pihak ini juga melibatkan untuk kesediaannya dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura. hal ini ditandai dengan adanya dialaog tatap muka yang dilakukan, kepercayaan antar stakeholder yang terkait satu sama lain. Dan didalam hal komitmen para pihak yang terlibat dari masing-masing sudah berjalan dengan baik. Dan masing-masing pihak yang terlibat sudah ada SK tanggung jawab dalam menjaga lingkungan, selanjutnya dalam proses kerjasama antar pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dan pihak swasta berjalan dengan baik, karna dalam proses ini semata-mata untuk menjaga agar kesehatan masyarakat dan pihak swasta terjaga dan jauh dari pencemaran lingkungan.

Faktor-faktor yang mendukung dalam proses kolaborasi dalam menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura, dalam hal ini terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, adapun yang menjadi faktor internalnya yaitu adanya dukungan dari Dinas-Dinas di Kabupaten Lingga, serta ikut dalam mensukseskan kegiatan menjaga lingkungan atau kegiatan Adipura, selanjutnya adanya dukungan dari pihak Polres TNI Satpol PP dan Damkar yang ikut serta dalam penetapan dalam menjaga lingkungan. Sedangkan faktor Eksternalnya yaitu Adanya Kolaborasi yang Baik dengan Masyarakat dan terakhir Adanya Kolaborasi yang Baik dengan Pihak Swasta.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Harus adanya pembentukan wadah untuk menyampaikan pendapat tentang menjaga lingkungan, supaya kolaborasi antara masyarakat dan pihak swasta dengan pihak pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup tetap terus berjalan dan juga bisa berkelanjutan.
2. Pihak pemerintah haruslah meningkatkan kinerja dalam kegiatan menjaga lingkungan, agar masyarakat dan pihak swasta dan juga pihak yang terlibat dalam kegiatan menjaga lingkungan hidup atau kegiatan Adipura. tetap meningkatkan komitmennya dalam berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Sabaruddin. 2015. *Manajemen kolaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Pendidikan Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Press.

Agus Dwiyanto. 2011. *Manajemen Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

Purwanti Nurul D. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta, Center for

Policy & Management Studies: FISIPOL UGM.

Soerjono soekanto. 2009. *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Edisi Baru, Rajawali Pers.

Sibagy, P. Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Suryabrata, Sumdai. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini & Akbar, Prunomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*

Jakarta : PT Bumi Aksara.

2. Artikel Ilmiah

Afrinaldy Rustam, 2016, *Pengaruh Motivasi Kedisiplinan dan Kepemimpinan Dinas kebersihan terhadap prestasi kerja petugas*, JOM FISIP, Vol. 1 No 2

Dewi, Ratna. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajaan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponogoro)*, Tesis Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret.

Fahrul Rozi, 2018. *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mendapatkan Piala Adipura Tahun 2017*. Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan

Indah Septiana, 2016. *Evaluasi Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Mempertahankan Adipura Tahun 2014-2015*. Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan

Mardhiyah, Yunus, 2015, *Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Meraih Penghargaan Adipura di Kabupaten Pasaman*. Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan

Zaki Maulana Putra, 2013, *Payakumbuh Mayor Government Leadership In Managing Clean Linesss 2015-2017*, JOM FISIP Vol.1 No 3

Zulfikar, Saleh Djualianti, 2015, *Strategi Pemerintah Dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros*, JOM FISIP, Vol.1 No.2

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2018. Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Lingga Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/kum.1/6/2016. Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura

4. Dokumen Lainnya

Kabupaten Lingga Dalam Angka 2018 (Badan Pusat Statistik)

Keputusan Bupati Lingga No:86/KPTS/II/2018 Tentang Pembentukan Tim Pemantau dan Penanggung Jawab Lokasi Titik Pantau Program Adipura Kabupten Lingga

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga 2018

Panduan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Lingga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pemkab Lingga Raih Penghargaan Adipura Kabupaten Lingga. [http:// www.linggakab.go.id/2017/07/31/pemkab_lingga_raih_penghargaan_adipura/](http://www.linggakab.go.id/2017/07/31/pemkab_lingga_raih_penghargaan_adipura/) di akses 06 Desember 2019